

PERAN ANGKATAN BERSENJATA DALAM PEMBINAAN SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIK DAN BERKEADILAN SOSIAL MENJELANG MILENNIUM KE-3

Z.A. Maulani

Karl von Clausewitz pada 1832 mengumandangkan diktumnya yang terkenal bahwa "perang ialah sisi dari politik". Sebagai akibat dari diktum tersebut, maka misi dari tiap angkatan bersenjata, di mana pun, tidak pernah lepas dari politik, bersangkutan seperti benang dengan kelindan. Oleh karena itu rumusan tugas pokok bagi angkatan bersenjata mencerminkan kehendak untuk menjamin pengamanan dan pemeliharaan tujuan politik nasional. Ada empat tugas pokok angkatan bersenjata pada umumnya: pertama, mendukung dan mengamankan kepentingan-kepentingan nasional; kedua, melindungi dan mempertahankan integritas wilayah nasional dari ancaman agresi pihak lawan; ketiga, mencegah atau mengurangi dampak kerusakan wilayah sebagai akibat dari tindakan musuh; dan yang keempat, memenuhi kewajiban-kewajiban internasionalnya.

Dalam praktek ada berbagai variasi dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut di berbagai negara. Variasi terjadi karena adanya perbedaan dalam cara pandang bangsa melihat dunianya, yang mencerminkan pengaruh perjalanan sejarah, watak dan budaya bangsa yang bersangkutan; juga karena adanya perbedaan pada interpretasi subyektif tentang realitas lingkungan strategis nasional maupun internasional, termasuk di dalamnya penilaian bangsa bersangkutan tentang ancaman yang dipersepsikan, serta skala dari potensi dan kekuatan nasional yang mereka miliki.

Nilai-nilai nasional seperti kemerdekaan, kedaulatan, integritas wilayah, serta segala apa yang dipandang sebagai nilai-nilai nasional (*national heritage*), pada galibnya secara konseptual terwadahi dalam konstitusi nasional. Dalam hubungan ini mempertahankan konstitusi negara merupakan wujud konkret interpretasi tentara tentang misi-

nya. Berbagai negara seperti Brasi-
lia, Turki, dan Pakistan, membenarkan angkatan bersenjata mengambil langkah-langkah tertentu ("intervensi politik") bilamana konstitusi nasional dinilai terancam.

Mayjen TNI (Purn.) pernah menjabat Pangdam Tanjung Pura, Sesjen Departemen Transmigrasi dan sekarang Penasehat Menristek Bidang Hankam.

Tentara Turki tercatat bahkan telah beberapa kali melakukan intervensi politik setiap kali tercium gelagat konstitusi Turki yang sekuler dinilai terancam.

Pada dasarnya tidak ada angkatan bersenjata yang tak berpolitik. Semua angkatan bersenjata di dunia turut berpolitik dalam berbagai cara, bahkan termasuk kaum militer di negara-negara yang menganut paham demokrasi Barat sekalipun. Setiap angkatan bersenjata mempunyai saham dalam pembinaan sistem politik. Peran politik mereka "bukan pada pertanyaan apakah ada, tapi pada berapa luas dan cara bagaimana". Bahkan Amerika Serikat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip "kekuasaan sipil" atas militer tidaklah kebal dari kenyataan itu, meski pelibatan militer di sana dalam politik tidak dalam bentuk langsung dan intervensi terbuka dalam proses politik. Meskipun berada di luar wilayah politik praktis, keterlibatan militer dalam kegiatan politik tidak pernah dapat ditepis. Ambil saja misalnya peran lobi militer di dalam kabinet maupun Kongres AS dalam pembentukan politik luar negeri, atau dalam perumusan keputusan-keputusan politik mengenai proyek-proyek industrial tertentu.¹

1. Claude E. Welch, Jr. dan Arthur K. Smith, *Military Role and Rule*, North Scituate: Duxbury Press, 1974, h. 6, sebagaimana dikutip oleh Hassan Habib dalam *The Role of the Indonesian Armed Forces in the Political System of Indonesia*, Mimeografi IATD, Jakarta, 1993, hl. 3.

Peran Politik ABRI

Awal keterlibatan ABRI dalam politik tak terlepas dari interpretasi tentang tugas-pokok militer di atas tadi, yaitu dari persepsi tentara yang merasa berkewajiban mendukung atau melindungi apa yang mereka pandang sebagai kepentingan-kepentingan nasional. Kekhawatiran akan kemungkinan Republik menjadi berantakan oleh berbagai konflik internal antar kekuatan perjuangan telah mendorong TNI pada periode 1945-1957 mengambil langkah-langkah yang sarat dengan warna politik di luar tugas-tugasnya sebagai alat pertahanan-keamanan. Peristiwa 17 Oktober 1954, yakni intervensi politik tentara yang menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan perlemen dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan, merupakan contoh paling gamblang tentang kejengkelan para perwira TNI-AD sehubungan dengan pertikaian partai-partai politik, yang mereka anggap menjadi penyebab utama mengapa kabinet tidak pernah mampu bertahan hidup cukup lama. Periode tersebut memang mencatat instabilitas politik yang berkepanjangan, yang telah memberi dampak yang traumatik diingatkan sebagian besar kita tentang sistem demokrasi parlementer. Peran politik tentara pada masa itu oleh ABRI dikenang sebagai peran "pemadam kebakaran".

Peluang ABRI untuk turut-serta dalam politik secara resmi terbuka tatkala Bung Karno, yang membu-

tuhkan sekutu untuk menghadapi partai-partai membentuk 'Dewan Nasional' pada bulan Mei 1957. Dewan baru ini mencakup semua kalangan yang oleh Bung Karno dikategorikan sebagai "golongan-golongan fungsional dalam masyarakat", termasuk di dalamnya "pejabat-pejabat militer yang dipandang perlu".² Sehubungan dengan masuknya TNI ke dalam arena politik formal melalui Dewan Nasional tersebut, KSAD A.H. Nasution merasa perlu menjelaskan melalui pidatonya yang berjudul 'Jalan Tengah' pada 11 Nopember 1958 di Magelang, bahwa keikut-sertaan TNI dalam politik "tidak akan berusaha untuk mengambil-alih pemerintahan". Nasution juga menegaskan tentang jati-diri TNI, bahwa TNI:

"bukan sekedar 'alat pemerintah' sebagaimana yang berlaku di negara-negara Barat; bukan pula 'alat suatu partai' sebagaimana yang ditemukan di negara-negara komunis; apalagi semacam 'rejim militer' yang mendominasi negara.

TNI adalah 'alat perjuangan rakyat', sebagai salah satu keikut-sertaan dalam kehidupan politik itu, TNI tidak akan tidak aktif".

Dengan pidato 'Jalan Tengah' tersebut peran sosial-politik ABRI terus berkembang dari sekedar sebagai "pemadam kebakaran" menjadi "salah satu dari kekuatan politik nasional" yang aktif. Sejarah mencatat perjalanan peran sosial-politik ABRI

terus meningkat.

Hancurnya PKI dan surutnya pengaruh kekuatan-kekuatan politik yang ada bersamaan dengan teringkirnya Bung Karno, telah menampilkan ABRI menjadi satu-satunya kekuatan politik yang berarti sesudah kudeta yang gagal dari Gestapu/PKI. Dalam Seminar AD II yang dilangsungkan pada bulan Agustus 1966 menghasilkan produk Doktrin Perjuangan TNI-AD 'Tri Ubaya Cakti' II yang merupakan perbaikan dari doktrin 1965 yang lama. Pada alinea ke delapan dari Doktrin ini berbunyi sebagai berikut:

"Achir-achir ini segenap harapan Rakjat diarahkan kepada ABRI pada umumnya, TNI-AD pada khususnya, untuk dapat membawanya menuju ke kesedjahteraan. Maka bagi ABRI hanya ada satu alternatif, ialah merealisasikan apa yang telah dipertujakan oleh Rakjat. Oleh karena semuanya ini ABRI berkepentingan untuk ikut menjusun dan membina suatu Pemerintahan yang kuat dan berwibawa, suatu Pemerintahan yang kuat dan suatu Pemerintahan yang progresif".³

Pernyataan Seminar TNI-AD II/1966 ini telah mengubah kedudukan ABRI dari posisi "bukan sekedar sebagai alat Pemerintah", sebagai mana pernah dinyatakan oleh KSAD A.H. Nasution pada 1958, menjadi "Pemerintah yang kuat, berwibawa dan progresif" untuk membawa rakyat "menuju ke kesejahteraan". Dan selama tigapuluh tahun terakhir Pemerintah Orde Baru yang didukung oleh ABRI, secara umum memang

2. Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer*, LP3S, Jakarta, 1992, h. 10-11.

3. Salim Said, *Dwifungsi ABRI: Dulu, Kini dan Kelak*, Mimeografi Seskoed, Bandung, 1996, h. 4.

telah berhasil membawa rakyat kepada kesejahteraan fisik-material yang cukup memukau. Bank Dunia bahkan menyebut prestasi pembangunan ekonomi Indonesia sebagai suatu *economic miracle*. Meski diakui dengan tulus masih adanya kekurangan di sana-sini, Pemerintah yang diprakarsai oleh ABRI tersebut telah berhasil mengubah wajah Indonesia dari suatu negara yang bertopang hanya pada sektor pertanian menjadi "negara industri baru" (NIC), dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dapat dilihat pada indikator dari indeks mutu kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang kini semakin kencang diajukan adalah apakah peran ABRI di masa depan akan juga dapat menghantar rakyat kepada "sistem politik yang semakin demokratis dan berkeadilan sosial"?

Sikap ABRI terhadap Demokrasi dan Keadilan Sosial

Sikap resmi ABRI dalam peran sosial-politiknya menyatakan bahwa ABRI senantiasa-

*"mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat, dan menolak paham politik adu kekuatan, karena (cara itu) dapat menimbulkan perpecahan serta merongrong persatuan dan kesatuan bangsa;"*⁴

Seraya menegaskan kembali apa yang pernah diucapkan oleh Nasution

pada 1958, doktrin resmi ABRI itu menyatakan:

*"peran sosial-politik ABRI tidak akan menjurus kepada militerisme, diktatorisme, ataupun totaliterisme, serta menolak paham-faham lain yang tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila."*⁵

Dari sikap tersebut Doktrin Cadek 1988 selanjutnya merumuskan misi ABRI dalam perannya sebagai kekuatan sosial-politik, sebagai berikut:

"bersama-sama dengan organisasi sosial-politik lainnya mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan, serta mendorong setiap upaya meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dalam rangka memantapkan ketahanan nasional guna mewujudkan tujuan nasional;"
*"mendorong dan mendinamisasikan pengembangan kehidupan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan UUD-1945."*⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas secara kategorik ABRI memiliki komitmen kepada 'pengembangan demokrasi Pancasila; 'kesejahteraan bagi seluruh rakyat', serta 'kehidupan konstitusional' sebagaimana terumus dalam UUD-1945. Bahkan pada bagian lain ABRI mengklaim dirinya sebagai 'penegak demokrasi Pancasila'.⁷

Pemahaman ABRI tentang 'demokrasi' dan 'keadilan sosial' utuh mengalir dari konsep pemikiran mengenai 'kedaulatan rakyat' dan 'keadilan sosial' yang merupakan gagasan dasar dari UUD-1945. Komitmen ini mudah dipahami bi-

4. Doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma 1988, Mabes ABRI, Jakarta, 1988, h. 58.

5. *Ibid.*, h. 58.

6. *Ibid.*, h. 58.

7. *Ibid.*, h. 57.

lamana dihubungkan dengan tujuan umum setiap angkatan bersenjata untuk menjunjung tinggi, melindungi dan mempertahankan konstitusi sebagai tugas prioritas.

Keberhasilan ABRI untuk membawakan peran pembinaan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial tentu saja tidak akan cukup hanya ditentukan oleh pernyataan sikap formal, tetapi terutama ditentukan oleh realitas bagaimana perilaku *in concreto* pada peringkat praktis terhadap komitmen tersebut. Latar belakang budaya dan struktur organisasi militer yang berciri hierarkhi-piramidal menyebabkan keberhasilan pelaksanaan komitmen tersebut oleh ABRI sebagai institusi akan sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku kelompok penentu, yakni korps perwiranya.

Korps Perwira ABRI-Kelompok Penentu

Perilaku politik korps perwira ABRI sangat dipengaruhi oleh kerangka rujukan, latar belakang asal-usul sosial, proses pembentukan dan pendidikan militer, korps dan pengalaman penugasannya. Ambil saja, misalnya, perbedaan yang ada antara kelompok perwira yang mendapatkan pendidikan dari KNIL dihadapkan dengan kelompok perwira eks-PETA yang memperoleh pendidikan pembentukan mereka dari Jepang, yang mendapat kesempatan bersentuhan dengan pemikiran Barat merasa

lebih dekat dengan sikap politik Hatta dan Sjahrir. Nasution menyatakan kedekatan mereka dengan tokoh-tokoh seperti Sjahrir semata-mata karena tokoh-tokoh tersebut lebih rasional, mampu dengan jernih melihat permasalahan nasional yang ada.⁸ Dalam kaitan ini pula kita lebih mudah memahami mengapa "kelompok perwira KNIL" lebih mudah menerima gagasan 'reorganisasi dan rasionalisasi' tentara yang berasal dari Sjahrir dan didukung oleh Hatta, ketimbang rekan-rekan mereka yang berasal dari "kelompok perwira PETA". Demikian juga kesediaan mereka tanpa ragu pada awal 1950-an "memberikan dukungan kepada pemerintahan sipil", dengan konsekuensi peran politik TNI menjadi sangat dikurangi, bahkan dihapuskan sama sekali, berdasarkan konsep demokrasi liberal yang menempatkan tentara di bawah subordinasi kekuasaan sipil.⁹ Kalau kemudian "kelompok perwira KNIL" ini pula yang menuntut dibubarkannya parlemen pada peristiwa 17 Oktober 1954, hal itu semata-mata karena didorong oleh hilangnya kepercayaan mereka terhadap sistem politik yang tidak memiliki kemampuan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa. Korps

8. Salim Said, *Genesis of Power*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, h. 85.

9. Salim Said, *Ibid.*, h. 130.

perwira ABRI masa kini telah sepenuhnya terdiri dari generasi pasca-1945. Sejak integrasi ABRI pada 1969 calon perwira karier ABRI menjalani gembengan pembentukan di bawah satu atap, yaitu AKABRI. Kemudian setelah melalui pendidikan karier di korps dan angkatan masing-masing, mereka kembali disatukan di bawah satu atap, di SESKO ABRI. Kebijakan pengintegrasian kurikulum ini memberikan manfaat positif dilihat dari upaya untuk memelihara ketuhanan dan kesatuan korps perwira ABRI. Namun sebaliknya proses profesionalisme dan resimentasi itu telah menimbulkan kekhawatiran di banyak kalangan tentang kemungkinan akan melahirkan suatu kasta militer profesional, yang tidak lagi merakyat lalu bersikap asing terhadap aspirasi demokrasi.

Perubahan suasana tadi dan kemungkinan dampaknya agaknya disadari benar oleh ABRI. Hal itu dapat kita tangkap dari pernyataan Pangab Jenderal Feisal Tanjung, bahwa ABRI akan tetap menjadi 'tentara rakyat' dan akan tetap setia kepada komitmen-komitmenya.¹⁰ ABRI memang dituntut harus bersikap lebih profesional akibat pesatnya perkembangan teknologi militer dan komplikasi masalah keamanan. Tekad untuk

membentuk korps perwira yang profesional tercermin pada motto ABRI untuk memasuki abad ke-21 - "Profesional, Efektif, Efisien dan Modern" (PEEM).

Motto itu menarik. Karena beberapa waktu yang silam, penggunaan istilah "profesional" dengan hati-hati selalu dihindari oleh ABRI. Senior ABRI yang berasal dari "kelompok semangat" biasanya dengan cepat mengkaitkan istilah "militer profesional" dengan "tentara bayaran", semacam "tinju profesional" atau "tinju bayaran". Para pemimpin ABRI masa kini menyatakan profesionalisme yang dimaksud adalah tetap dalam pengertian ABRI yang kita kenal selama ini. Profesionalisme juga menurut ABRI tidak terbatas hanya ada 'fungsi yang kesatu' saja, tetapi meliputi juga 'fungsi kedua' sebagai kekuatan sosial-politik. Upaya profesionalisasi ditempuh tak terbatas hanya melalui peningkatan mutu keluaran dari sistem pendidikan ABRI, tapi juga ditempuh melalui jalur rekrutmen calon perwira karier dari sumber lain di luar AKABRI.

Dasar pemikiran inilah nampaknya yang mendorong ABRI semenjak 1996 secara mantap membuka peluang bagi calon-calon perwira karier dari sarjana lulusan perguruan tinggi sipil. Perwira karier yang berasal dari sumber non-AKABRI dibutuhkan bukan hanya untuk mengisi jabatan dalam dinas-dinas yang bercorak tek-

10. Sk. Jawa Post, Surabaya, 9 April 1994.

nis pada masing-masing angkatan, tapi latar belakang multidisiplin yang menyertai mereka juga dibutuhkan guna meningkatkan mutu profesionalisme pada fungsi teritorial serta sosial-politik dalam jajaran ABRI. Lebih dari itu, komposisi korps perwira yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan asal pendidikan, mencerminkan semangat demokratisasi di dalam tubuh angkatan bersenjata. Kebijakan menerima infus dari sumber perwira yang semakin melebar, memperkuat watak ABRI sebagai 'tentara rakyat', dan berdampak positif pada sikap korps perwira terhadap proses demokratisasi dan penegakan keadilan sosial di masa depan.

Tantangan yang Dihadapi

Revolusi teknologi di bidang komunikasi, transportasi dan informasi selama dua dekade terakhir ini telah berdampak menjadikan "dunia tanpa tapal batas". Peningkatan mobilitas manusia dan idea berjasa membangun rasa persamaan umat manusia sebagai umat yang satu. Kesadaran akan martabat manusia tanpa menghiraukan latar belakang ras, agama dan budaya, telah semakin membangun kesadaran akan arti keadilan, hak-hak azasi manusia, demokrasi dan lingkungan hidup yang memberikan jaminan bagi kesejahteraan berkelanjutan bagi anak cucu umat manusia. Tidak ada negara yang mampu membendung tuntutan

umat manusia tersebut. Indonesia tidak terkecuali. Tuntutan untuk memperkuat kehidupan konstitusional, demokratisasi, hak-hak azasi manusia dan lingkungan hidup, tanpa kecuali dari hari ke hari terus semakin kuat. Desakan itu bukan saja merupakan gejala yang mendunia, tapi juga berkat keberhasilan pembangunan nasional menimbulkan "tuntutan yang semakin meningkat" di dalam masyarakat kita. Lagi pula aspirasi akan hak-hak azasi manusia, demokrasi, serta keadilan sosial, bukanlah sesuatu yang baru. Para pendekar kemerdekaan Indonesia sejak merebaknya fajar cita-cita akan 'negara bangsa', telah mendambakan dan menuangkan nilai-nilai tersebut secara terang dan jelas di dalam UUD-1945. Upaya mewujudkan cita-cita itu terus berlangsung tanpa henti. Ada pencapaian namun juga ada tantangan-tantangan baru yang muncul.

Pelajaran yang kita peroleh selama ini adalah bahwa pembinaan sistem politik yang demokratik tidaklah terlepas berdiri-sendiri. Pencapaian ditentukan oleh keberhasilan kita membangun bidang-bidang lain yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Pembangunan sistem politik yang demokratik menuntut pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, agar cukup kuat menjalankan tanggung-jawab politik mereka tatkala harus berhadapan dengan pemerintah

yang pada dasarnya memang telah kuat. Upaya pemberdayaan ekonomi dan politik masyarakat menuntut persyaratan adanya suatu sistem peradilan yang "merdeka" dan kuat (*a strong and independent judicial system*) agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan. Dan di atas segalanya, kehidupan konstitusional yang demokratis, yang ditopang dengan kedaulatan hukum yang berfungsi efektif, sehingga memungkinkan masyarakat menjalankan hak-hak politiknya secara sadar dan bertanggungjawab, menuntut dukungan sikap budaya tertentu, sebut saja budaya modern.

Pada awal Orde Baru ketika urutan prioritas tuntutan bangsa masih sederhana, yaitu sekedar tersedia pangan, sandang dan papan yang layak dan terjangkau oleh rakyat, maka peran segenap kekuatan politik nasional juga masih sederhana. Kita cukup diminta bekerja keras, barangkali juga diminta akan kesediaan sedikit pengorbanan antara lain kebebasan-kebebasan tertentu yang pernah dijanjikan oleh konstitusi. Kini telah terjadi perubahan besar, yang juga mengubah urutan prioritas harapan-harapan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana peran ABRI selanjutnya menjawab berbagai tuntutan besar tadi.

Selama ini ABRI memang merupakan kekuatan politik yang dominan di atas pentas kehidupan politik nasional. Namun secara obyektif harus di-

akui, dewasa ini ABRI tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan yang paling mampu. Menurut hemat saya, masa *TNI alles kan* sudah lama lewat. Telah muncul kekuatan-kekuatan baru - kaum profesional, kaum modal besar, kaum intelektual, bahkan kelompok kepentingan dari luar yang turut serta dalam interaksi nasional kita, yang kesemuanya berjasa membangun suatu struktur kekuatan yang sama sekali baru dalam konstelasi yang juga baru.

Kalau sekiranya dugaan penulis benar, bahwa harapan untuk membina sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial ditumpukan semata-mata hanya pada ABRI, penulis khawatir hal itu merupakan harapan yang berlebihan, harapan yang kurang realistis. Agaknya kita menuntut terlalu banyak dari ABRI.

Namun sebagai kekuatan yang masih dominan dalam pentas politik nasional, kemampuan ABRI memberikan jawaban terhadap berbagai tantangan itu akan tetap dipandang sebagai ukuran keberhasilan ABRI memenuhi tugas-pokoknya di bidang sosial politik yang belum selesai, yakni "mendinamisasikan kehidupan demokrasi Pancasila" serta "mengamankan dan menyukseskan upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia".

Tantangan yang dihadapi oleh misi sosial politik ABRI adalah bagaimana menerjemahkan misi dan komitmen tersebut ke dalam

kebijakan-kebijakan konkret yang segera dapat didengar, disaksikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, seperti misalnya: apa kebijakan dan upaya nyata lembaga-lembaga teritorial dan sosial politik ABRI, baik pada peringkat infra maupun suprastruktur untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik; apa upaya ABRI untuk turut mendorong berkembangnya sistem peradilan yang "merdeka" dan kuat, yang mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada segenap rakyat; bagaimana pula wujud peran serta ABRI dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang mengacu kepada pemerataan pendapatan serta peningkatan daya beli masyarakat lapisan menengah dan bawah; bagaimana kebijakan peran serta ABRI dalam memandang masalah ketenagakerjaan, misalnya pada masalah upah, sengketa industri, dan pengangguran; dan masih banyak lagi masalah-masalah konkret yang hidup di dalam masyarakat.

Apa yang disebutkan di atas pada umumnya merupakan masalah-masalah dasar (*the roots of problems*) yang potensial berdampak secara langsung terhadap stabilitas sosial, politik, ekonomi dan keamanan. Jadi terkait erat sekali dengan peran stabilisator dari ABRI. Dan segenap pemikiran dan ikhtiar ABRI turut serta dalam pemecahan masalah tersebut, dapat kita pandang sebagai memfungsikan peran dinamisator dari Dwi-

fungsi ABRI. Dapat kita simpulkan, peran stabilisator tidak lagi dapat diartikan sekedar dalam arti teknis keamanan. Masalah keamanan di masa kini dan kelak telah terkait erat secara kompleks dengan berbagai aspek non-hankam. Penyesuaian peran stabilisator dan dinamisator dari Dwifungsi ABRI terhadap tantangan baru tersebut menuntut pendefinisian ulang pendekatan terhadap makna stabilitas.

Independensi Politik

Sebagai suatu kekuatan sosial politik yang mengikat diri kepada demokrasi dan keadilan sosial, selalu terbuka kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara misi politik ABRI dengan kekuasaan. Teori maupun pengalaman telah membuktikan kebenaran tersebut. Oleh karena itu untuk dapat menjalankan misinya sebagai "kekuatan perjuangan rakyat" pada suatu tingkat tertentu ABRI membutuhkan adanya suatu independensi politik. Persyaratan ini merupakan sesuatu yang dilematik.

Sebagai juga suatu kekuatan bersenjata yang mengemban fungsi dan tanggungjawab sebagai alat negara di bidang pertahanan keamanan, pengertian independensi politik ABRI tak akan pernah sama dengan otonomi yang ada pada partai politik. Independensi politik ABRI akan selalu relatif terbatas. Independensi penuh,

apalagi yang tak terkendali, dan yang dilakukan dengan semangat yang berlebihan, berdasarkan pengalaman masa silam, justru hanya akan menimbulkan berbagai komplikasi yang merugikan.¹¹ Sebaliknya, tanpa adanya independensi dari kepentingan kekuasaan, mustahil ABRI akan mampu menjawab tuntutan hati nuraninya dengan tulus.

Pelaksanaan independensi politik menuntut kearifan. Karena antara independensi politik dengan insubordinasi dalam ukuran militer klasik sulit dibedakan. Dituntut kemampuan dan kearifan kepemimpinan untuk tetap mampu menegakkan independensi politik, dan pada waktu yang bersamaan tidak terjebak menjadi mutini militer. Persyaratan itu bukannya tidak mungkin dilakukan. Panglima Besar Soedirman telah menjalankan sementara beliau tetap berhasil memelihara hubungan baiknya dengan pimpinan nasional Bung Karno dan Bung Hatta. Men/Pangad Jenderal A. Yani berhasil melakukannya hampir sebagai suatu seni dalam situasi yang sulit untuk mempertahankan sikap politik TNI-AD, namun tetap memelihara hubungan erat dengan Presiden Soekarno pada waktu itu. Dalam menjalankan misinya ABRI dapat saja me-

iliki pandangan politik yang berbeda dengan pihak-pihak lain. Namun ekspresinya menuntut suatu tingkat kearifan, kematangan kepemimpinan dan kecakapan profesionalisme, yang memungkinkan ABRI tetap mampu berpegang teguh dan memelihara tujuan-tujuan tanpa perlu menimbulkan kontradiksi atau menciptakan komplikasi dengan Pemerintah, atau dengan kekuatan sosial politik lainnya.¹²

Penutup

Peran ABRI mendukung pembinaan sistem politik yang semakin demokratis dan berkeadilan sosial terkait erat dengan jati diri dan tugas pokok ABRI. Seiring dengan itu, demokrasi dan keadilan sosial telah menjadi tuntutan rakyat yang semakin kuat akibat keberhasilan pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang demokratis, adil, makmur dan maju. Kemampuan ABRI memberikan tanggapan dan dukungan terhadap tuntutan itu tidak dapat dilepaskan dari jati diri ABRI sebagai 'tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional'.

ABRI dituntut untuk membuktikan kepada dunia, bahwa pernyataan sebagai "penegak demokrasi" tidak menjadi suatu per-

11. Sayidiman Suryohadiprojo, *Ke-pemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1996, h. 10.

12. Saafroedin Bahar, *ABRI dan Proses Demokratisasi*, Mimeografi Lemhanas, Jakarta, 1990.

nyataan yang hampa. Kegagalan membuktikan pernyataan tersebut memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap kredibilitas ABRI dan wajah Indonesia di mata dunia.

Dan di atas segala-galanya, komitmen kepada demokrasi Pancasila

la dan keadilan sosial merupakan misi yang dipikulkan sendiri oleh ABRI ke atas pundaknya. Dan kita semua memahami, dalam idealisasi tradisi militer, kegagalan mewujudkan misi dan komitmen merupakan suatu hal yang tidak akan pernah dapat dimaafkan.